

**AUDIT PEMERINTAH DAN PENGENDALIAN  
KORUPSI: BUKTI DARI DATA PANEL PROVINSI  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**SHOHIB ABROR**

**NIM. 12030112150020**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Shohib Abror  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112150020  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi  
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **Audit Pemerintah dan Pengendalian  
Korupsi: Bukti dari Data Panel Provinsi  
di Indonesia**  
Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 13 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,



Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt.

NIP 19741222 200012 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Shohib Abror  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112150020  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi: Bukti dari Data Panel Provinsi di Indonesia**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal **Agustus 2014**

### Tim Penguji

1. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt.

(..........)

2. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.

(..........)

3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

(..........)

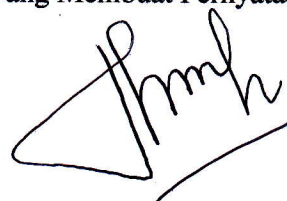
## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Shohib Abror**, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi: Bukti dari Data Panel Provinsi di Indonesia**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan,



Shohib Abror

NIM. 12030112150020

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit pemerintah dan pengendalian korupsi di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah korupsi sedangkan variabel independen adalah temuan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan.

Penelitian ini menggunakan data populasi seluruh provinsi di Indonesia tahun 2012 dan 2011. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan kejaksaaan, IHPS BPK RI (I 2013, II 2012 dan II 2011), dan Statistik Indonesia 2013. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Pengujian secara statistik atas hipotesis menyimpulkan bahwa temuan perkapita terbukti berpengaruh signifikan dan negatif terhadap korupsi, sedangkan tindak lanjut temuan perkapita terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap korupsi.

Kata kunci: audit pemerintah, korupsi, temuan , tindak lanjut.

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is examining the role of government auditing in Indonesia's corruption control initiatives. The dependent variable is corruption and the independent variables are irregularities and rectivication effort.*

*This study uses population data all provinces in Indonesia. The data used are secondary data, the prosecutor annual reports in 2012 and 2011, IHPS BPK RI (I 2013, II 2012, II 2011) and the Statistical Yearbook of Indonesia 2013. Statistical tools used in this study is multiple linear regression.*

*Statistical hypothesis testing on irregularities per capita concluded that the findings proved significant and negative effect on corruption. Also, rectivication effort per capita proved significant and positive effect on corruption.*

*Keywords: government auditing, corruption, irregularities, rectivication effort.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur “Alhamdulillah” kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi dengan judul “**Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi: Bukti dari Data Panel Provinsi di Indonesia**” ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi pada Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kekurangan dan tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. M. Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama perkuliahan.
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretaris Jenderal BPK, dan seluruh jajarannya terutama Biro Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis menempuh bangku kuliah di Universitas Diponegoro.

6. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Keluarga penulis Ibu dan Alm. Bapak, kakak dan keluarga besar yang telah menyayangi penulis semenjak kecil.
8. Rekan-rekan penulis di kelas kerjasama BPK dan Kemenkeu di UNDIP yang telah memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan satu bimbingan (Muam, Lutfi, Yudi, Mas Farid) yang telah memberikan banyak masukan dan saran terhadap skripsi ini.
10. Rekan-rekan penulis di *Economics English Conversation Club (EECC)*, Tim KKN tematik inventarisasi aset Fakultas Psikologi (Mas Hazmi, Jefri, Aris, Yudi, Bayu, Hendra, Okta, Novi), Tim KKN tematik Desa Tambak Lorok, dan Tim KKN tematik Desa Timbulsloko, serta Tim KKN Desa Lowungu (Satrio, Rara, Azis, Wulan, Vivi, Nalida, Heny, Adit) yang telah memberikan semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

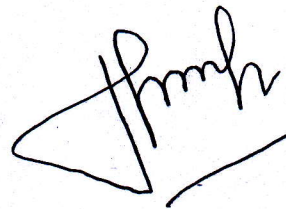
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat



membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Semarang, 13 Agustus 2014

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shohib Abror', written over a large, stylized, abstract shape that resembles a triangle or a large letter 'A'.

Shohib Abror

NIM. 12030112150020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	8
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	8
2.1.1. <i>Government Auditing</i> .....	8
2.1.2. Korupsi.....	10

2.1.3. <i>Institutional Background</i> .....	12
2.1.4. Teori Kepatuhan .....	14
2.1.5. Penelitian Terdahulu.....	15
2.2. Kerangka Pemikiran .....	16
2.3. Hipotesis .....	16
2.3.1. Temuan Pemeriksaan dan Korupsi.....	16
2.3.2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Korupsi.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	23
3.1.1. Variabel Dependen .....	23
3.1.2. Variabel Independen .....	24
3.1.2.1. Temuan Perkapita.....	24
3.1.2.2. Tindak Lanjut Perkapita.....	24
3.2. Populasi dan Sampel .....	24
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	26
3.5. Metode Analisis .....	26
3.5.1. Statistik Deskriptif .....	27
3.5.2. Uji Asumsi Klasik .....	27
3.5.2.1. Uji Multikolinieritas .....	27
3.5.2.2. Uji Autokorelasi .....	28
3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas .....	29
3.5.2.4. Uji Normalitas .....	30

3.5.3. <i>Ordinary Least Squares</i> .....	31
3.5.4. Uji Hipotesis .....	32
3.5.4.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	33
3.5.4.2. Uji Statistik t .....	33
BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....	34
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	34
4.2. Analisis Data .....	35
4.2.1. Statistik Deskriptif .....	35
4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik .....	37
4.2.2.1. Uji Multikolinieritas .....	39
4.2.2.2. Uji Autokorelasi .....	40
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas .....	42
4.2.2.4. Uji Normalitas .....	42
4.2.3. Persamaan Regresi OLS .....	45
4.2.4. Pengujian Hipotesis .....	46
4.2.4.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	46
4.2.4.2. Uji Statistik t .....	47
4.3. Interpretasi Hasil .....	49
4.3.1. Temuan Pemeriksaan Berpengaruh Signifikan Dan Negative Terhadap Korupsi Di Daerah Tersebut.....	49
4.3.2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berpengaruh Signifikan dan Positif.....	50
Bab V PENUTUP .....	51
5.1. Simpulan .....	51

5.2. Keterbatasan .....	51
5.3. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Proses Seleksi Data.....	25
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	35
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas dengan Matriks Korelasi.....	37
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas dengan Nilai <i>Tolerance</i> dan VIF .....	38
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi korupsi.....	39
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser Korupsi.....	42
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> (K-S) Korupsi.....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi OLS Korupsi.....	45
Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi Korupsi.....	46
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t Korupsi.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	16
Gambar 4.1 Diagram Heteroskedastisitas Korups.....	41
Gambar 4.2 Uji Normalitas Korups Dengan Normal P-P Plot.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai audit pemerintah dan pengendalian korupsi di Indonesia. Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Berikut ini penjelasan secara rinci mengenai masing-masing bagian.

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (Donal, 2013) mengatakan otonomi daerah yang seharusnya menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah. Pasca otonomi daerah, kewenangan dan dana untuk pemerintah daerah ditambah dan hal tersebut juga menjadi pemicu lahirnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Menurut catatan ICW, hingga tahun 2013 ada 149 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kepala daerah tersebut terdiri dari 20 gubernur, satu wakil gubernur, 17 walikota, delapan wakil walikota, 84 bupati dan 19 wakil bupati era reformasi pada tahun 1999. Kondisi tersebut sejalan dengan Liu dan Lin (2012) yang menyatakan bahwa sektor keuangan publik terbuka untuk korupsi karena mendapatkan keuntungan kekuatan finansial dari sektor perpajakan, penganggaran, pengadaan barang, dan manajemen aset negara.



Audit pemerintah yang mempunyai tujuan dasar untuk memonitor, memastikan dan menilai akuntabilitas pemerintah merupakan institusi penting dalam rangkaian pengendalian pemerintahan modern. Dengan memonitor kekuatan publik terutama dalam penggunaan sumber daya publik, audit pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. Praktek pemerintah di beberapa negara juga mengindikasikan bahwa audit pemerintah dapat memerankan peran unik dalam pemberantasan korupsi. Auditor mempunyai kemampuan dalam mendeteksi laporan keuangan yang membuat mereka efektif dalam menginvestigasi korupsi yang terjadi. Di sisi lain, menurut Gong (dikutip oleh Liu dan Lin, 2012) efek jera dari audit pemerintah dapat ditingkatkan dengan membuat hasil audit diketahui masyarakat dan menetapkan birokrat individu yang bersangkutan bertanggungjawab. Oleh karena itu, Liu dan Lin (2012) menjelaskan bahwa jika korupsi adalah "virus" yang membahayakan keamanan ekonomi dan keharmonisan sosial maka sistem audit pemerintah seharusnya menjadi "*immune system*" yang mendeteksi, menolak, dan mengeluarkan virus tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau

badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan mandat tersebut BPK RI dapat berperan sebagai “*immune system*” yang mendeteksi, menolak dan membuang virus korupsi.

Peran tata kelola audit dan faktor-faktor penentu dan pemicu korupsi dibahas secara terpisah dalam banyak studi. Menurut Zhuang (dikutip Liu dan Lin, 2012) penelitian tentang korupsi terutama berfokus pada *power for money deal*, penyusunan dalam bidang ekonomi dan perbankan, sedikit perhatian diberikan kepada korupsi dalam keuangan publik. Sementara itu, penelitian tentang bagaimana untuk mengurangi korupsi jarang memberi perhatian khusus terhadap peran audit. Sebaliknya, literatur tentang audit pemerintah terutama berfokus pada independensi, profesionalisme dan *auditing input* dari lembaga audit pemerintah dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi reputasi dan efisiensi departemen pemerintah. Hanya beberapa studi menyentuh pada hubungan antara audit pemerintah dan korupsi. Namun, tidak satupun dari studi tersebut menjawab pertanyaan tentang bagaimana audit pemerintah dapat membantu untuk memberantas korupsi (Liu dan Lin, 2012).

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 23 G, BPK RI berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Oleh karena itu, Perwakilan BPK RI dapat berperan dalam mengungkap temuan penyimpangan dan perilaku korupsi dan dapat berperan juga dalam upaya pencegahan dan tindak lanjut pada pemerintah di provinsi tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang

diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Menggunakan kasus korupsi yang dilakukan pegawai publik yang ditangani oleh kejaksaan pada masing-masing provinsi tersebut sebagai pengukur keparahan korupsi, secara empirik peneliti meneliti peran audit pemerintah dalam upaya melawan korupsi dari dua perspektif yaitu temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“AUDIT PEMERINTAH DAN PENGENDALIAN KORUPSI: BUKTI DARI DATA PANEL PROVINSI DI INDONESIA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tentang sejauh mana pengaruh auditing terhadap korupsi, penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan berikut:

1. Apakah jumlah penyimpangan yang terdeteksi oleh BPK RI Perwakilan Provinsi berpengaruh terhadap tingkat keparahan korupsi birokrasi publik di provinsi tersebut?
2. Apakah semakin banyak upaya tindak lanjut rekomendasi perbaikan dilaksanakan setelah audit akan semakin efektif mengurangi korupsi?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Bagian ini akan menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan

kegunaan penelitian terbagi menjadi kegunaan bagi peneliti, lembaga terkait, dan akademisi. Berikut adalah uraian dari masing-masing bagian.

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara empiris, menganalisis pengaruh jumlah penyimpangan yang terdeteksi oleh Perwakilan BPK RI di provinsi terhadap tingkat keparahan korupsi birokrasi publik di provinsi tersebut.
2. Secara empiris, menganalisis pengaruh upaya tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan setelah audit pemerintah terhadap korupsi.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh audit pemerintah dan pengendalian korupsi.
2. Bagi lembaga terkait, sebagai masukan kepada Kejaksaan dan BPK RI dalam rangka meningkatkan peran dalam pengendalian korupsi.
3. Bagi akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, sebagai bahan kajian teoritis dan referensi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan tujuan untuk penyajian yang sistematis dan kemudahan dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, ringkasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

##### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian dan keterbatasan penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam menginterpretasikan hasilnya. Selain itu, bab ini juga memberikan saran bagi penelitian lainnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, uraian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini adalah penjelasan dari tiap-tiap bagian.

#### **2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

Bagian ini menjelaskan landasan teori yang merupakan landasan dari perumusan hipotesis. Selain itu juga dijelaskan penelitian terdahulu terkait audit pemerintah dan pengendalian korupsi.

##### **2.1.1. *Government Auditing***

Menurut Arens, dkk (2012) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Tugas pengumpulan bukti tersebut dilakukan oleh auditor.

Teori audit klasik (*Classic audit theory*) mengatakan bahwa kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam system akuntansi klien (DeAngelo, 1981). Sedangkan terkait dengan audit pemerintah, Zhao (dikutip oleh Liu dan Lin, 2012) mengajukan kerangka karakteristik terkait kualitas audit pemerintah kedalam tiga kategori yaitu: faktor teknik (kompetensi profesional, jumlah auditor, dan jumlah jam kerja), faktor

independensi (biaya audit, reputasi auditor, dan desain organisasi dari lembaga audit), dan faktor administratif (menentukan kasifikasi temuan, membuat keputusan yang tepat, dan memantau tindak lanjut perbaikan). Wei *et al* (dikutip Liu dan Lin 2012) berargumen bahwa perbaikan atau tindak lanjut yang dilakukan institusi audit dan pihak terkait setelah masalah diketahui adalah faktor paling penting dalam menentukan apakah audit pemerintah berhasil memenuhi kewajibanya.

Beberapa peneliti mendiskusikan pentingnya audit pemerintah dalam sektor publik. Olken (2007) mengadakan *‘field experiment’* terkait pengaruh pengawasan audit pemerintah di Indonesia dan mendokumentasikan hasilnya bahwa probabilitas proyek jalan lintas desa yang diaudit pemerintah meningkat dari 4% menjadi 100%, korupsi (*overspending*) dalam proyek tersebut turun sebesar 8%. Begitu juga dengan Ferraz dan Finan (dikutip Liu dan Lin 2012) menemukan bahwa laporan audit pemerintah dapat mengungkap aktivitas korupsi dan kemudian mempengaruhi hasil pemilihan umum. Li Jinhua (dikutip Liu dan Lin 2012) menegaskan bahwa audit pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan demokrasi dan penegakan hukum. Mantan *General Auditor* di Cina tersebut mengemukakan konsep teori “*watchdog*” bahwa audit adalah *watchdog* dari aset negara. Sedangkan *General Auditor* di Cina yang sedang menjabat Liu Jiayi (dikutip Liu dan Lin 2012) menambahkan peran institusi audit sebagai “*Immune System*” yang menjaga keamanan dari seluruh kehidupan sosial, ekonomi dan sistem keuangan. Sebagai teori “*immune system*” audit pemerintah



lebih menekankan pada upaya pencegahan dan perbaikan daripada pendeteksian penyimpangan.

Beberapa peneliti mempelajari efektivitas dan efisiensi audit pemerintah di Cina. Misalnya Wei et al (dikutip Liu dan Lin 2012) membahas bagaimana sanksi dan denda, kasus yang ditangani dan penyampaian laporan audit mempengaruhi dana keuangan publik. Sedangkan Li *et al* (dikutip Liu dan Lin 2012) memeriksa apakah audit pemerintah terutama auditing akuntabilitas terkait ekonomi dapat mencegah pegawai pemerintah dan anggota dewan dari korupsi.

Penelitian terdahulu terkait audit pemerintah yang dilakukan di Cina dan internasional berguna untuk memahami peran audit pemerintah dalam mengontrol pemerintahan, termasuk penguatan akuntabilitas publik, pengendalian korupsi dan peningkatan efisiensi. Berdasarkan penelitian tersebut, Temuan pemeriksaan yang berhasil dideteksi mencerminkan kualitas audit disamping itu pada dasarnya juga menggambarkan penyimpangan atau masalah korupsi pada sektor publik. Audit pemerintah hanya akan berjalan sebagai pencegah korupsi jika tindak lanjut perbaikan terhadap penyalahgunaan dalam proses penerimaan dan pengeluaran dana dan dengan jaminan bahwa keputusan dan rekomendasi dilaksanakan seluruhnya. Jika tidak dilakukan audit pemerintah tidak akan berguna (Liu dan Lin 2012).

### **2.1.2. Korupsi**

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (Dikutip oleh Tuanakotta 2012 h.196). Korupsi digambarkan dalam ranting-ranting: benturan

kepentingan (*conflicts of interest*), penyuapan (*bribery*), hadiah (*illegal gratuities*), dan *economic extortion*.

Sedangkan menurut Singleton et al (2010, h.101) dijelaskan korupsi sebagai berikut:

*Frauds categorized as corruption are perpetrated by employees, against the organization, for the benefit of the employee. For corruption to occur, someone on the inside has to work with someone on the outside in such a way that the relationship is a detriment to the organization. Knowing how to identify this relationship is critical to fraud prevention and detection. Red flags include the general behavioral red flags and lifestyle change, but also watch for the following:*

1. *relationships between key employees and authorized vendors,*
2. *secrecy surrounding this third-party relationship,*
3. *a lack of review on management approvals for known third-party relationship that exist (over time, the fraudster may begin to steal using that relationship if the entity gets comfortable with it),*
4. *anomalies in recording transactions (e.g. what is the debit for a bribe on the book?),*
5. *anomalies in approving vendors.*

Auditor dapat mendeteksi penyimpangan dan *red flags* bahwa penyimpangan tersebut terjadi melalui bukti pemeriksaan yang telah dilakukan.

Rumusan lain terkait korupsi mengacu pada Undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001 yang merumuskan 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang terbagi dalam tujuh kelompok yaitu: (a) kerugian keuangan negara, (b) suap-menyuap, (c) penggelapan dalam jabatan, (d) perbuatan pemerasan, (e) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (g) gratifikasi.

Sistem audit pemerintahan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari institusi politik dan ekonomi secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah melakukan pengecekan keseimbangan kekuatan publik. Audit pemerintahan dianggap sebagai tentara aktif dalam kampanye anti korupsi global, akan tetapi studi sebelumnya menyediakan sedikit bukti empiris terkait hubungan antara audit pemerintah dan pengendalian korupsi. Tidak seperti kebanyakan studi yang mencari reformasi institusi fundamental dan perkembangan pasar untuk menghentikan korupsi, penelitian ini secara tentative memeriksa salah satu mekanisme akuntabilitas profesional; audit pemerintah untuk tujuan khusus (Liu dan lin, 2012).

### ***2.1.3 Institutional background***

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Dalam pemeriksaan auditor biasanya menemukan temuan pemeriksaan. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Temuan pemeriksaan biasanya

terdiri dari unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Namun demikian, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan pemeriksaan tergantung seluruhnya pada tujuan pemeriksaannya. Jadi, sebuah temuan atau sekelompok temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan pemeriksaannya telah dipenuhi dan laporannya secara jelas mengaitkan tujuan tersebut dengan unsur temuan pemeriksaan, misalnya apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maka unsur yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat sedangkan unsur sebab bersifat *optional*.

Sedangkan pengertian rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/badan berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang syah.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai rekomendasi BPK. Menurut peraturan BPK nomor 2 Tahun 2010 tentang pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu; tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

#### **2.1.4. Teori Kepatuhan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan.

Pemerintah terikat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam pelaksanaan pemerintahan terkait penggunaan keuangan negara. Pemerintah akan mematuhi peraturan tersebut karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan perpektif kepatuhan terhadap hukum menurut Tyler (dalam Saleh dan Susilowati dalam Sulisty, 2010) yang menyebutkan bahwa perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi

mereka. Hal tersebut juga sejalan dengan Sudaryanti (dikutip oleh Sulisty, 2010) yang menjelaskan bahwa komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

#### **2.1.5. Penelitian Terdahulu**

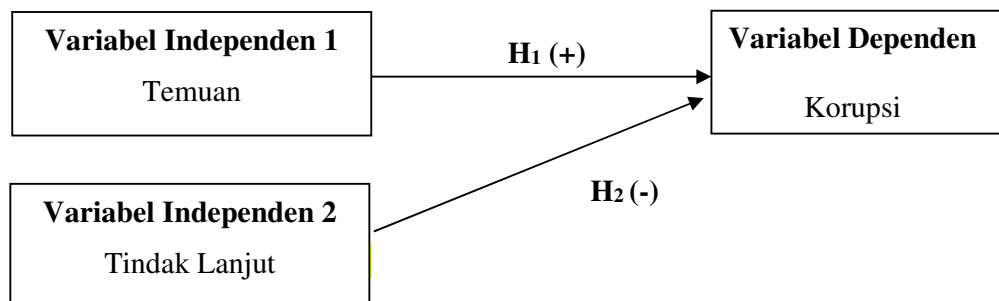
Penelitian terkait audit pemerintah dan pengendalian korupsi masih sangat jarang di Indonesia. Salah satu referensi internasional yaitu penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Lin (2012) yang menganalisis pengaruh audit pemerintah dan pengendalian korupsi di Cina. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jumlah temuan yang dideteksi oleh audit pemerintah berhubungan positif dengan tingkat korupsi di provinsi tersebut yang berarti, semakin parah kasus korupsi di daerah tersebut maka semakin banyak temuan penyimpangan yang ditemukan oleh lembaga audit di provinsi tersebut. Upaya perbaikan setelah audit (tindak lanjut) berhubungan negatif dengan tingkat korupsi di provinsi tersebut, mengindikasikan semakin banyak upaya tindak lanjut maka semakin sedikit korupsi.

#### **2.2. Kerangka Pemikiran**

Bagian ini menggambarkan kerangka pemikiran penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diuji, yaitu variabel-variabel independen dan variabel dependen. Variabel-variabel dan arah hubungan yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti variabel yang digunakan oleh Lin dan Lin (2012) dalam penelitiannya

menggunakan variabel Temuan, tindak lanjut dan korupsi. Kerangka pemikiran teoritis digambarkan dalam Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



### 2.3. Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2011). Hipotesis tersebut diperoleh berdasarkan hasil kesimpulan dari landasan teori dan penelitian sebelumnya. Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang pernah dilakukan tersebut, penelitian ini menyimpulkan dua hipotesis, yaitu (i) pengaruh temuan pemeriksaan terhadap korupsi (ii) pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap korupsi. Adapun pembahasan untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut.

#### 2.3.1 Temuan Pemeriksaan dan korupsi

Fungsi yang paling penting dari audit pemerintah adalah menentukan apakah proses penerimaan dan pengeluaran dana publik dan transaksi lain yang

relevan sejalan dengan hukum dan peraturan negara, menentukan apakah terdapat perilaku yang menyimpang dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik, dan mengungkap adanya temuan yang membahayakan akuntabilitas pemerintah kedalam laporan audit. Menurut peraturan audit di Indonesia lembaga audit harus mengawasi dengan auditing keabsahan, kepatuhan dan efisiensi pemerintah. Dalam dekade ini, audit pemerintah di Indonesia lebih ditujukan melakukan supervisi dari keabsahan dan kepatuhan. Sebagaimana terlihat dalam laporan audit yang dipublikasikan beberapa tahun terakhir, lembaga audit provinsi dapat menemukan dan mengungkap penyimpangan yang melawan hukum dan peraturan.

Korupsi adalah penyalahgunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan selalu dibandingkan dengan standar yang legal. Tipe-tipe korupsi menurut Sevansson (dikutip Liu dan Lin, 2012) meliputi penjualan secara illegal asset pemerintah, *kickbacks* dalam pengadaan pemerintah dan penyuaipan (*bribery*) serta penggelapan (*embezzlement*) dana pemerintah. Karena sifat kerahasiaan dan bermacam-macamnya bentuk korupsi, lembaga profesional terlebih dahulu mengidentifikasi dan menemukan perilaku korupsi untuk mengontrolnya. Auditor pemerintah mempunyai kecakapan dalam mendeteksi fraud dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset pemerintah. Oleh karena itu ditetapkan untuk berperan aktif dalam mendeteksi korupsi Gong (dikutip Liu dan Lin, 2012). Jumlah temuan penyimpangan dalam audit pemerintah dalam kondisi tertentu mencerminkan apakah lembaga audit berhasil dalam mendeteksi fraud. Hal yang lebih penting temuan penyimpangan tersebut mencerminkan



bagaimana sumberdaya publik disalahgunakan oleh sektor pemerintah dan departemen terkait. Beberapa peneliti menggunakan sifat perilaku menyimpang yang dideteksi dalam audit pemerintah untuk mengukur keahlian dan usaha dari lembaga audit (Ma 2007; Li et al., 2011; dalam Liu dan Lin 2012), akan tetapi beberapa peneliti memperlakukannya sebagai pengukuran langsung terhadap korupsi (Melo et al.,2009; Pereira at al.,2009; Ferraz and Finan, 2011 dikutip Liu dan Lin 2012). Ketika institusi audit independen dan pekerjaan audit sangat teknis dan tidak memihak temuan penyimpangan dan pelanggaran yang dilaporkan oleh institusi audit dapat digunakan sebagai alat ukur yang bagus untuk korupsi yang dilakukan pemerintah. Dalam penelitian ini temuan penyimpangan yang ditemukan lembaga audit dipersamakan dengan korupsi berdasarkan literatur sebelumnya (Glaeser and Saks, 2006; Zhao and Tao, 2009; Wu and Rui, 2010 dalam Liu dan Lin 2012). Peneliti menggunakan kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai publik di setiap provinsi untuk mengukur keparahan korupsi. Pada satu sisi, investigasi korupsi bukan merupakan tujuan utama dari audit pemerintah. Disisi yang lain, berdasarkan data laporan hasil audit dan data lainnya, masalah yang ditemukan oleh lembaga audit pemerintah selalu dilakukan oleh sebuah departemen yang berbeda dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai publik. Meskipun demikian hubungan antara temuan pemeriksaan yang ditemukan oleh lembaga audit dan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dalam beberapa kondisi tidak dapat ditolak. Secara umum kasus korupsi dan temuan pemeriksaan keduanya mencerminkan kualitas dari penatausahaan pemerintah. Di tempat yang korupsinya parah, ada semakin banyak temuan atau aktivitas illegal

atau *red flags* yang dapat ditelusur melalui akun dan penjelasan laporan keuangan yang harus diperhatikan oleh auditor pemerintah yang profesional, cermat dan bertanggungjawab. Jika lembaga audit tidak dapat menemukan jejak dari pegawai yang korup maka lembaga tersebut tidak dapat memenuhi tanggung jawab supervisinya. Oleh karena itu, peneliti menetapkan hipotesis berikut ini:

H1 : temuan pemeriksaan yang dideteksi oleh BPK RI Perwakilan berpengaruh positif terhadap korupsi di provinsi tersebut.

### **2.3.2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Korupsi**

Jumlah temuan pemeriksaan yang dideteksi oleh audit pemerintah mencerminkan berapa jumlah pelanggaran yang terjadi dalam operasional pemerintah. Meskipun, temuan penyimpangan yang diungkap dalam laporan audit jauh dari cukup untuk mencegah birokrasi yang korup dan potensi pelaku selanjutnya. Kunci dari membatasi korupsi adalah akuntabilitas. Untuk mendefinisikan akuntabilitas penting untuk menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing departemen pemerintah, institusi terkait negara dan pegawai publik secara individu dan menegakkan sanksi dan denda ketika hak tidak dilakukan sejalan dengan perundangan dan peraturan dan begitu juga ketika tanggung jawab tidak dipenuhi. Oleh karena itu, deteksi terhadap temuan dalam audit pemerintah hanyalah langkah awal dan langkah selanjutnya yang lebih penting adalah “meminta pertanggungjawaban dan membuat koreksi”. Hanya melalui penekanan yang lengkap dan berkelanjutan dari keputusan audit, sanksi, denda dan saran dan menghukum pelaku dan meningkatkan manajemen maka

efek pencegahan dari auditing dapat dijamin. Jika tidak keputusan audit akan tidak berguna dan pelanggaran dan praktik yang salah akan terjadi lagi dan lagi (Liu dan Lin 2012).

Untuk memenuhi tujuan dari system audit pemerintah, harus ada tahap “*asking for responsibility*” setelah pelanggaran dan penyimpangan ditemukan oleh auditor. Klitgaard (Dikutip Liu dan Lin 2012) mengajukan model umum untuk menjelaskan dinamika dari korupsi: korupsi sama dengan monopoli kekuatan ditambah kebijaksanaan dikurangi akuntabilitas. Adit (2013) juga menunjukkan bahwa kekuasaan diskresi, *economic rent* dan kelembagaan yang lemah adalah tiga kondisi yang diperlukan korupsi untuk muncul dan bertahan. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa korupsi berakar pada kekuatan berlebih dari instansi pemerintah dan pegawai pemerintah, ditambah dengan supervisi yang lemah, sedangkan penguatan rezim akuntabilitas dapat mengurangi korupsi. Dibandingkan dengan rezim akuntabilitas lainnya audit pemerintah meletakkan keahlian dalam *system checks and balances* dan deteksi penipuan. Untuk mengecek dan menyeimbangkan kekuatan yang pertama harus ditetapkan adalah dimana masalahnya dan siapa yang bertanggungjawab untuk masalah tersebut. Semua tindakan terlarang atau tidak teratur dapat dilacak dalam transaksi keuangan dan catatan akuntansi. Auditor telah lama akrab dengan sistem keuangan dan buku akuntansi, dan dengan demikian dapat memainkan peran unik dalam deteksi penipuan dan pengendalian korupsi (Gong dikutip Liu dan Lin 2012). Bank Dunia menganggap kantor audit nasional atau audit lembaga tertinggi sebagai pengikat dari sistem integritas suatu negara, karena audit dapat membantu

untuk: (1) mencegah korupsi dan mencegah bocornya dana publik (2) memperkuat kerangka kerja keuangan dan kelembagaan hukum, (3) membuat prediktabilitas perilaku pemerintah dan hukum, dan mengurangi kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum dan aturan, dan (4) mengekspos kebijakan yang tidak transparan terhadap kepentingan publik (Dye dan Stapenhurst dalam Liu dan Lin 2012). Namun, semua peran seharusnya dilakukan oleh auditor tergantung pada sistem pemerintahan yang kuat dengan mekanisme akuntabilitas yang efektif (Gong dalam Liu dan Lin 2012).

Sistem audit pemerintah pada dasarnya adalah "alat yang mempromosikan demokrasi dan aturan hukum," yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan melakukan pengawasan penerimaan dan pengeluaran sektor pemerintah dan instansi terkait lainnya. Korupsi adalah kanker kronis yang merugikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan merupakan target lembaga audit untuk menggali, melawan dan mencegah terjadi berulang kali. Selain mendeteksi dan melaporkan malpraktek dan perilaku menyimpang, lembaga audit juga bisa memberikan rekomendasi dan memantau tindak lanjutnya. Lembaga audit terlibat dalam proses perbaikan dalam beberapa cara, yaitu : (1) menetapkan pelaku dan nilai penyimpangan secara langsung, (2) melimpahkan informasi kasus kepada pihak yang berwenang dan membuat saran pada sanksi dan hukuman yang harus dijatuhkan; (3) membuat saran tentang cara untuk memperbaiki kekurangan dalam administrasi pemerintahan dan bagaimana untuk menyempurnakan lembaga-lembaga pemerintah, dan (4) memantau tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dan keputusan hasil audit. Upaya perbaikan

tersebut lebih penting daripada deteksi penipuan dan pelaporan, karena hanya dengan menghukum pelanggaran dan memperbaiki perilaku pada waktu itu tatanan ekonomi dan fiskal dapat dipertahankan dan transparansi pemerintah dapat dicapai. Hasil tindakan perbaikan setelah audit dapat mencerminkan efektivitas pengawasan audit pemerintah dan sangat penting dalam menentukan apakah sistem audit dapat mengurangi korupsi. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan hipotesis berikut:

H2 : Tindak lanjut pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap korupsi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian tersebut terbagi ke dalam lima bagian yaitu variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2011). Variabel dalam penelitian dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

##### **3.1.1. Variabel Dependen**

Variabel dependen (*dependent variable*) atau variabel kriteria (*criterion variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2011). Variabel dependen ditentukan oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah korupsi.

Korupsi diukur dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan di setiap provinsi, disesuaikan dengan ukuran populasi (kasus per 10.000 penduduk) (Liu dan Lin, 2012).

### **3.1.2. Variabel Independen**

Variabel independen (*independent variable*) atau variabel prediktor (*predictor variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah  $Temuan\_Perkapita_{i,t}$  dan  $TL\_Perkapita_{i,t}$ .

#### **3.1.2.1 Temuan Perkapita**

$Temuan\_Perkapita_{i,t}$  diukur dengan log dari temuan pemeriksaan BPK RI yang disesuaikan dengan jumlah populasi (rupiah perkapita, transformasi log) (Liu dan Lin, 2012).

#### **3.1.2.2 Tindak Lanjut Perkapita**

$TL\_Perkapita_{i,t}$  diukur dengan log rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan sanksi dan denda dalam rekomendasi tersebut. Khususnya jumlah yang dikembalikan ke kas negara/daerah, dikembalikan kepada saluran yang seharusnya, dan jumlah bantuan atau hibah yang dihentikan setelah pemeriksaan disesuaikan dengan jumlah populasi (rupiah perkapita, transformasi log) (Liu dan Lin, 2012).

### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi di Indonesia yang sudah aktif melaksanakan pemerintahannya sebanyak 33 provinsi. Terkait data korupsi dari Kejaksaan Tinggi yang mempunyai wilayah hukum di dua provinsi maka Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat digabung

menjadi satu observasi. Sedangkan provinsi Sulawesi Selatan digabung dengan Provinsi Sulawesi Barat menjadi satu observasi. Sehingga jumlah total observasi menjadi 31.

Waktu pengamatan adalah 2 tahun yaitu tahun 2011 dan 2012 sehingga jumlah observasi data panel menjadi 165.

**Tabel 3.1**  
**Proses Seleksi Data**

<b>Data asal: <math>31 \times 2 = 62</math></b>		
Tahun	2011	2012
Observasi	31	31

Sumber : data diolah

Temuan pemeriksaan mencakup seluruh temuan pemeriksaan pada tahun 2011 dan 2012, sedangkan tindak lanjut pemeriksaan merupakan tindak lanjut sesuai rekomendasi terhadap temuan dari tahun 2009 sampai dengan 2012.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumentasi instansi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang ada. Data tersebut sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan kejaksaan tahun 2011-2012 yang diperoleh dari situs resmi kejaksaan ([www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id)), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2011-2013 diperoleh dari situs resmi BPK RI



([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)), dan statistik Indonesia dari *statistical yearbook of Indonesia* 2013.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mencatat data tersebut. Laporan Tahunan Kejaksaan, IHPS BPK RI dan Statistik Indonesia dalam bentuk *softcopy* dipublikasikan pada website lembaga terkait.

### **3.5. Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Andi field (2009, h.198) menjelaskan “Regression analysis is a way of predicting an outcome variable from one predictor (simple regression) or several predictor variables (multiple regression)”. Dalam analisis regresi, disamping mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen.

Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi disebut *Ordinary Least Squares* (OLS) atau Pangkat Kuadrat Terkecil Biasa. Regresi OLS adalah metode analisis yang mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2013). Alat bantu dalam menganalisa adalah SPSS 21. Tahapan pengujian metode tersebut adalah sebagai berikut:

### 3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2013). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata, *standard deviation*, nilai maksimum, dan nilai minimum.

### 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Penelitian ini menggunakan uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, serta uji normalitas.

#### 3.5.2.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari permasalahan multikolinieritas. Kriteria yang digunakan dalam mendeteksi adanya masalah multikolinieritas adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai *Tolerance*  $> 0,1$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ , maka tidak terjadi permasalahan multikolinieritas.

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka terdapat indikasi telah terjadi permasalahan multikolinieritas.

### 3.5.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  (saat ini) dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka disebut ada permasalahan autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari permasalahan autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson (*DW Test*). *DW Test* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi serta tidak terdapat variabel lain diantara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* ( $du$ ) dan ( $4-du$ ) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Apabila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* ( $dl$ ) maka autokorelasi  $> 0$ , berarti ada autokorelasi positif.
3. Apabila DW lebih besar dari ( $4-dl$ ) maka koefisien autokorelasi  $< 0$ , berarti ada autokorelasi negatif.
4. Apabila DW terletak antara ( $du$ ) dan ( $dl$ ) atau DW terletak antara ( $4-du$ ) dan ( $4-dl$ ), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

### 3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama, maka telah terjadi homoskedastisitas; jika berbeda, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Scatterplot*. Uji *Scatterplot* dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (ZRESID). Kriteria yang digunakan dalam uji *scatterplot* adalah sebagai berikut :

1. Apabila terdapat pola tertentu berupa titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas.
2. Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas.

Untuk menghindari kelemahan hasil pengamatan yang cukup signifikan yang dihasilkan oleh analisis grafik dengan jumlah pengamatan yang sedikit, maka digunakan uji statistik melalui uji *Glejser*. Nilai signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Uji *Glejser* dilakukan dengan

meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi :

$$|Ut| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Kriteria yang digunakan dalam melakukan uji *Glejser* adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai probabilitas (sig.) variabel independen terhadap variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt) < 0,05, maka disimpulkan bahwa terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas.
2. Apabila nilai probabilitas (Sig.) variabel independen terhadap variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt) > 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas.

#### **3.5.2.4. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi penelitian variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk menguji normalitas dapat menggunakan analisis grafik dengan *normal probability plot (P-P plot)* dan uji statistik melalui uji *Kolmogorov-Smirnov*. Analisis grafik dengan *normal probability plot (P-P plot)* menunjukkan model regresi yang memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Untuk menghindari kesalahan visual yang dihasilkan oleh analisis grafik, maka digunakan uji statistic non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Nilai signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan

dalam penelitian ini adalah 5%. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis :

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Kriteria yang digunakan dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai probabilitas (sig.) < 0,05, maka data residual terdistribusi secara tidak normal (Ho ditolak, Ha diterima).
2. Apabila nilai probabilitas (Sig.) > 0,05, maka data residual terdistribusi secara normal (Ho diterima, Ha ditolak).

### **3.5.3. Ordinary Least Square**

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Regresi OLS tersebut digunakan untuk mengukur kekuatan dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Korupsi}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{Temuan\_Perkapita}_{i,t} + \beta_2 \text{TL\_Perkapita}_{i,t} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Korupsi<sub>i,t</sub> = Korupsi diukur dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan

disetiap provinsi, disesuaikan dengan ukuran populasi (kasus per 10.000 penduduk).

Temuan\_Perkapita<sub>i,t</sub> = Temuan\_Perkapita<sub>i,t</sub> diukur dengan log dari temuan pemeriksaan BPK RI yang disesuaikan dengan jumlah populasi (rupiah perkapita, transformasi log)

TL\_Perkapita<sub>i,t</sub> = TL\_Perkapita<sub>i,t</sub> diukur dengan log rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan sanksi dan denda dalam rekomendasi tersebut. Khususnya jumlah yang dikembalikan ke kas negara/daerah, dikembalikan kepada saluran yang seharusnya, dan jumlah bantuan atau hibah yang dihentikan setelah pemeriksaan disesuaikan dengan jumlah populasi (rupiah perkapita, transformasi log) .

$\beta_0$  = Koefisien konstanta.

$\beta_1$ , dan  $\beta_2$  = Koefisien variabel independen provinsi i pada periode t.

$\varepsilon_{it}$  = *standard error*/variabel gangguan untuk provinsi i pada tahun t.

#### 3.5.4. Uji Hipotesis

Bagian ini menjelaskan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji statistik t.

#### **3.5.4.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### **3.5.4.2. Uji Statistik t**

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Nilai signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Uji statistik t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan SPSS versi 21.0. Kriteria yang digunakan dalam uji statistik t adalah sebagai berikut :

1. Apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi (sig.  $<$  0,05), maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak).
2. Apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (sig.  $>$  0,05), maka variabel independen tidak terpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima).